aml/cft journal
journal of anti-money laundering / countering the financing of terrorism

Original paper

Kebijakan Anti-Pencucian Uang dan Kesenjangan Pendapatan: Apa yang Ditunjukkan oleh Data?

Ricky Eka Prastianto[1, 2*], **Diah Widyawati**[1]
[1]Indonesia Financial Transaction Report and Analysis Centre (INTRAC), Jakarta, Indonesia
[2]Graduate Program in Economics, Faculty of Economics and Business, University of Indonesia, Campus Depok 16424, West Java, Indonesia

Korespondensi penulis: ricky.eka@ppatk.go.id

Kata Kunci:
Analisis data panel, kebijakan antipencucian uang, kesenjangan pendapatan, koefisien Gini, model efek tetap

Abstrak

Kesenjangan pendapatan masih menjadi tantangan ekonomi global hingga kini. Kesenjangan ini berkaitan dengan kejahatan finansial, seperti pencucian uang, korupsi, dan pengelakan pajak. Kendati banyak negara telah menerapkan kerangka kerja Anti-Pencucian Uang (Anti-Money Laundering/AML) demi menjaga integritas sistem keuangan, studi empiris mengenai efektivitas kebijakan AML terhadap distribusi pendapatan masih sangat terbatas. Oleh sebab itu, studi ini bertujuan menganalisis hubungan kedua variabel tersebut secara lintas negara untuk mengisi celah krusial di antara tata kelola keuangan dan ekonomi pembangunan. Memanfaatkan data panel tahunan dari 80 negara (periode 2012–2019), studi ini menerapkan model regresi efek tetap (fixed-effects). Tingkat kesenjangan pendapatan diukur menggunakan koefisien Gross Gini dan Net Gini dari Standardized World Income Inequality Database (SWIID) oleh Solt. Sementara itu, efektivitas AML diukur dengan Indeks AML Basel Institute on Governance, yang telah ditransformasikan secara matematis agar skor yang lebih tinggi mencerminkan implementasi AML yang lebih kuat. Variabel kontrol tambahan diambil dari World Development Indicators (WDI) Bank Dunia. Hasil analisis data menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan AML berbanding terbalik secara signifikan dengan tingkat kesenjangan pendapatan, baik pada skala Gross Gini maupun Net Gini. Hasil ini menunjukkan bahwa penguatan kerangka kerja AML tidak hanya berfungsi sebagai pencegah kejahatan finansial, tetapi juga berperan sebagai instrumen dalam mendorong pemerataan pendapatan. Temuan ini memberi implikasi penting bagi agenda pembangunan global, khususnya Poin 10 Sustainable Development Goals (SDGs).

Dikirimkan: 13 April 2026
Diterima: 30 Juni 2026
Diterbitkan: 4 November 2026

Copyright (c) Author

***Untuk mengutip artikel ini*:** Prastianto, R. E. & Widyawati, D. 2026. *Kebijakan Anti-Pencucian Uang dan Kesenjangan Pendapatan: Apa yang Ditunjukkan oleh Data? AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 5(1):1-17, https://doi.org/10.59593/amlcft.2026.v5i1.289

Pendahuluan

Salah satu hambatan utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tingkat global adalah masalah kesenjangan pendapatan yang belum menemukan solusi signifikan. Meskipun banyak negara di Asia memiliki rekor pertumbuhan ekonomi yang pesat selama

beberapa dekade terakhir, benua ini masih terus berhadapan dengan tren peningkatan kesenjangan pendapatan.[1] Banyak studi sebelumnya menunjukkan bahwa kesenjangan ini berhubungan erat dengan tindak pidana korupsi,[2] [3] maraknya aktivitas ekonomi bawah tanah (*underground economy*),[4] peningkatan kriminalitas,[5] serta pengelakan pajak.[6] Masalah-masalah ini menjadi semakin parah oleh praktik pencucian uang, yang memungkinkan hasil kejahatan disirkulasikan kembali ke dalam sektor ekonomi legal.

Sebagai upaya mengatasi hal tersebut, Anti-Pencucian Uang (*Anti-Money Laundering*/AML) dirancang sebagai instrumen kebijakan yang krusial untuk memutus saluran keuangan pemelihara praktik korupsi, aliran dana ilegal, dan pengelakan pajak, yang semuanya menjadi penopang disparitas pendapatan sistemik. Namun, di tengah kuatnya relevansi kebijakan AML, studi empiris mengenai efektivitas kebijakan AML dan kesenjangan pendapatan masih sangat terbatas. Sebagian besar studi terdahulu mendiskusikan AML dalam lingkup stabilitas keuangan, arus investasi asing langsung (FDI), serta kualitas tata kelola. Sebelum studi ini dijalankan, peneliti belum menemukan studi empiris representatif dari lintas negara yang secara khusus menguji hubungan antara efektivitas AML dan dampak distribusi pendapatan.

Pencucian uang adalah langkah penting dalam memelihara praktik korupsi. Gounev dan Bezlov[7] menegaskan bahwa mekanisme pencucian uang membuat para pelaku kejahatan korupsi menikmati keuntungan ilegal tanpa terendus hukum. Akibatnya, korupsi merusak kinerja ekonomi melalui distorsi alokasi sumber daya, pembengkakan biaya proyek, serta pelemahan insentif investasi dan inovasi.[8] Lebih parah lagi, korupsi memperlebar jurang kesenjangan ekonomi karena kekayaan dan sumber daya publik hanya terfokus pada elite politik dan pemilik modal, sementara kelompok masyarakat berpendapatan rendah hanya menerima manfaat yang sangat minim.[9]

Pengelakan pajak (*tax evasion*) merupakan aktivitas ilegal lain yang berkaitan dengan pencucian uang. Tindakan ini diakui sebagai penyebab utama kesenjangan ekonomi. Saat individu atau korporasi mengelak dari kewajiban pajak, hal itu akan mengganggu fungsi redistribusi fiskal otomatis.[10] Banyak skema pengelakan pajak, salah satunya menyembunyikan kekayaan di wilayah bertarif pajak rendah (*low-tax jurisdictions*) atau suaka pajak (*tax havens*).

[1] Binbing Huang and Guanghua Wan, Demystifying Rising Inequality in Asia (*Manila: Asian Development Bank*, 2019).

[2] Shrabani Saha, Hamid Beladi, and Saibal Kar, "Corruption Control, Shadow Economy and Income Inequality: Evidence from Asia," *Economic Systems* 45, no. 2 (2021): 100774, https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2020.100774.

[3] Mathew Yee Wong, "Public Spending, Corruption, and Income Inequality: A Comparative Analysis of Asia and Latin America," *International Political Science Review* 38, no. 3 (2017): 298–315, https://doi.org/10.1177/0192512116642617.

[4] Aziz N. Berdiev and James W. Saunoris, "On the Relationship between Inequality and the Shadow Economy," *Eastern Economic Journal* 45, no. 2 (2019): 224–249, https://doi.org/10.1057/s41302-018-0120-y.

[5] Paul-Philippe Paré and Richard Felson, "Income Inequality, Poverty and Crime across Nations," *British Journal of Sociology* 65, no. 3 (2014): 434–458, https://doi.org/10.1111/1468-4446.12083.

[6] Amedeo Argentiero et al., "Tax Evasion and Inequality," *Economics of Governance* 22, no. 4 (2021): 309–320, https://doi.org/10.1007/s10101-021-00261-y.

[7] Philip Gounev and Tihomir Bezlov, Examining the Links between Organised Crime and Corruption (*Sofia: Center for the Study of Democracy*, 2010), 45.

[8] Klaus Gründler and Niklas Potrafke, "Corruption and Economic Growth: New Empirical Evidence from 175 Countries," *European Journal of Political Economy* 60 (2019), https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2019.08.001.

[9] Sönke C. Schwuchow, "Organized Crime as a Link between Inequality and Corruption," *European Journal of Law and Economics* (2023), https://doi.org/10.1007/s10657-023-09764-x.

[10] Argentiero et al., "Tax Evasion and Inequality," 310.

Zucman [11] mengestimasi bahwa sekitar 8% dari total kekayaan rumah tangga global, setara dengan USD 5,9 triliun, disembunyikan di luar negeri (*offshore*). Aset yang tak terdeteksi ini tidak dapat diredistribusikan melalui kebijakan fiskal yang dapat memperburuk kesenjangan ekonomi. Penyembunyian kekayaan ini juga menyulitkan analisis ekonomi karena data administrasi pajak konvensional tidak mampu mendeteksi keberadaan aset secara akurat.[12]

Penguatan kebijakan AML dapat menekan praktik kecurangan di atas dengan menutup ruang gerak pelaku. Ketika skema pencucian uang diperketat, insentif untuk melakukan korupsi, pengelakan pajak, dan kejahatan keuangan lainnya akan berkurang. Penerapan AML yang lebih efektif juga meningkatkan kemampuan pihak otoritas untuk melacak, membekukan, dan merampas aset-aset ilegal. Pada akhirnya, program redistribusi akan berlangsung dan angka kesenjangan ekonomi juga mengecil.

Meskipun memiliki urgensi yang tinggi, studi empiris mengenai dampak penegakan AML terhadap kesenjangan pendapatan masih sangat terbatas. Padahal, kebijakan AML berinteraksi langsung dengan faktor-faktor pemicu kesenjangan. Hubungan inilah yang melandasi studi ini untuk meneliti keterkaitan kebijakan AML dan kesenjangan pendapatan antarnegara. Urgensi studi ini juga diperkuat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) Poin 10 yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai instrumen yang membatasi akumulasi kekayaan ilegal sekaligus mendukung redistribusi yang adil, kebijakan AML berpotensi menjadi instrumen vital dalam pencapaian target pembangunan global tersebut.

Guna menambahkan studi mengenai AML dan kesenjangan secara langsung, studi-studi sebelumnya mengenai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat memberikan landasan teoretis yang relevan. Goldbarsht dan de Koker [13] berargumen bahwa kerangka kerja AML berfungsi sebagai perpanjangan dari mekanisme tata kelola, baik di tingkat nasional maupun global. Kerangka kerja itu mengintegrasikan prinsip-prinsip utama seperti transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum (*rule of law*). Secara khusus, implementasi AML yang efektif memperkuat integritas institusional yang berdampak pada penguatan tata kelola keuangan.[14] AML berkontribusi langsung pada stabilitas dan integritas yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Demetriades dan Vassileva [15] menunjukkan bahwa kebijakan AML dan tata kelola yang baik memiliki hubungan positif yang saling memperkuat.

Studi mengenai hubungan antara tata kelola dan kesenjangan pendapatan menunjukkan temuan yang bervariasi. Shafique dan Haq [16] melaporkan bahwa regulasi yang lebih kuat dan penegakan hukum antikorupsi membantu menurunkan disparitas pendapatan di negara-negara

[11] Gabriel Zucman, "The Missing Wealth of Nations: Are Europe and the United States Net Debtors or Net Creditors?" *Quarterly Journal of Economics* 128, no. 3 (2013): 1321–1364, https://doi.org/10.1093/qje/qjt012.

[12] Gabriel Zucman, "Global Wealth Inequality," *Annual Review of Economics* 11, no. 1 (2019): 109–138, https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080218-025852.

[13] Doron Goldbarsht and Louis de Koker, eds., Financial Crime, Law and Governance: Navigating Challenges in Different Contexts, Ius Gentium: *Comparative Perspectives on Law and Justice* 116 (Cham: Springer, 2024), https://doi.org/10.1007/978-3-031-59547-9.

[14] International Monetary Fund, 2023 Review of the Fund's Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Policies, *Policy Paper* No. 2023/053 (Washington, DC: International Monetary Fund, 2023).

[15] Panicos O. Demetriades and Radostina Vassileva, "Money Laundering and Central Bank Governance," *Journal of International Economic Law* 23, no. 2 (2020): 509–533, https://doi.org/10.1093/jiel/jgaa01.

[16] Sadia Shafique and Rukhsana Haq, "Governance and Income Inequality," *Pakistan Development Review* 45, no. 4 (2006): 751–760, https://doi.org/10.30541/v45i4iipp.751-760.

SAARC. Sittha [17] melaporkan pola serupa di Thailand. Sebaliknya, Oueslati dan Labidi [18] melaporkan bahwa tata kelola tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap kesenjangan pendapatan di negara-negara MENA.

Studi terbaru dari Huang dan Ho [19], berdasarkan data dari 10 negara Asia (1996–2015), menemukan bahwa tata kelola yang baik menurunkan kesenjangan di negara berkembang, tetapi tidak berdampak signifikan di negara maju. Berbeda dari studi terdahulu yang berfokus pada satu kawasan tertentu, studi Huang dan Ho menggunakan data panel lintas negara dari seluruh wilayah utama untuk menguji apakah efektivitas AML memiliki hubungan yang bersifat universal atau terikat pada konteks wilayah tertentu (*context-dependent*). Pelibatan negara maju dan berkembang sekaligus memungkinkan pengujian apakah hubungan ini bervariasi berdasarkan kelompok pendapatan. Studi ini memberi kontribusi pada perdebatan akademis yang lebih luas mengenai tata kelola dan kesenjangan dalam kondisi negara yang heterogen.

Studi-studi di atas menunjukkan bahwa kualitas institusi memengaruhi distribusi pendapatan, yang secara teoretis mendukung hipotesis bahwa kebijakan AML memiliki efek serupa.

Secara konseptual, implementasi AML yang lebih kuat seharusnya berkorelasi dengan tingkat kesenjangan pendapatan yang lebih rendah. Nilai Indeks AML yang lebih tinggi (menandakan sistem AML yang lebih efektif) diharapkan berhubungan dengan nilai Koefisien Gini yang lebih rendah. Hipotesis hubungan ini terjadi karena kebijakan AML mampu menekan praktik korupsi, aliran keuangan ilegal, dan pengelakan pajak yang menjadi faktor pemicu utama disparitas pendapatan.

Pendekatan empiris untuk menguji hubungan ini, termasuk data, pengukuran variabel, dan strategi estimasi, kami uraikan secara rinci pada bagian Metodologi.

Studi ini diharapkan memberikan kontribusi dalam dua hal. Pertama, melaporkan analisis empiris mengenai interaksi antara regulasi AML dan kesenjangan pendapatan. Kedua, menyajikan bukti empiris bahwa efektivitas kebijakan AML tidak sekadar berfokus pada penegakan hukum pidana, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal secara tidak langsung. Hal ini dicapai dengan menekan pengelakan pajak dan aliran dana ilegal, sehingga mampu mendukung distribusi pendapatan yang lebih adil antarnegara secara signifikan.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan data dari 80 negara yang mencakup periode 2012–2019. Data Indeks AML bersumber dari Basel Institute on Governance, data Koefisien Gini diperoleh dari Standardized World Income Inequality Database (SWIID) oleh Solt, sedangkan variabel-variabel kontrol diambil dari World Development Indicators (WDI) Bank Dunia.

Negara dengan data yang hilang (missing data) melebihi 25% dari total periode pengamatan (yaitu lebih dari dua tahun dari rentang delapan tahun) dikeluarkan dari analisis, sehingga didapat 80 negara di akhir sampling. Limitasi sampel dalam studi ini diterapkan pada seluruh variabel guna menjaga integritas dan keseimbangan panel data. Tabel 1 menyajikan daftar negara yang digunakan dalam analisis, yang mewakili berbagai wilayah di dunia.

[17] Pitipat Vanichaka Sittha, "Governance and Poverty Reduction in Thailand," *Modern Economy* 3, no. 5 (2012): 487–497, https://doi.org/10.4236/me.2012.35064.

[18] Abdelkader Oueslati and Mohamed Ali Labidi, "Growth, Inequality and Governance: Evidence from a Panel of MENA Countries," *SSRG International Journal of Economics and Management Studies* 2, no. 2 (2015): 28–34.

[19] Chiung-Ju Huang and Yi-Hsuan Ho, "The Impact of Governance on Income Inequality in Asian Countries," *Journal of Reviews on Global Economics* 7 (2018).

Tabel 1. Daftar Negara

1	Afrika Selatan	21	Georgia	41	Luksemburg	61	Rumania
2	Albania	22	Honduras	42	Malaysia	62	Rusia
3	Amerika Serikat	23	Hongaria	43	Malta	63	Selandia Baru
4	Arab Saudi	24	India	44	Meksiko	64	Serbia
5	Argentina	25	Indonesia	45	Mesir	65	Sierra Leone
6	Armenia	26	Inggris	46	Moldova	66	Singapura
7	Australia	27	Irlandia	47	Mongolia	67	Siprus
8	Austria	28	Islandia	48	Montenegro	68	Slovakia
9	Belanda	29	Israel	49	Myanmar	69	Slovenia
10	Belgia	30	Italia	50	Nigeria	70	Spanyol
11	Bolivia	31	Jepang	51	Norwegia	71	Swedia
12	Brasil	32	Jerman	52	Pakistan	72	Swiss
13	Bulgaria	33	Kazakhstan	53	Panama	73	Thailand
14	Cile	34	Kirgizstan	54	Paraguay	74	Tiongkok
15	Denmark	35	Kolombia	55	Peru	75	Turki
16	Ekuador	36	Korea Selatan	56	Polandia	76	Ukraina
17	El Salvador	37	Kosta Rika	57	Portugal	77	Uni Emirat Arab
18	Estonia	38	Kroasia	58	Prancis	78	Uruguay
19	Filipina	39	Latvia	59	Republik Ceko	79	Vietnam
20	Finlandia	40	Lituania	60	Republik Dominika	80	Yunani

Sumber: Penulis

Dalam penelitian ini, variabel terikat yang digunakan adalah kesenjangan pendapatan yang diukur menggunakan Koefisien Gini, indikator standar dalam analisis distribusi pendapatan pada penelitian empiris. Data Koefisien Gini diperoleh dari SWIID oleh Solt.[20] SWIID merupakan salah satu basis data internasional paling komprehensif mengenai ketimpangan pendapatan karena mengonsolidasikan informasi dari berbagai sumber, termasuk basis data UNU-WIDER WIID, *Luxembourg Income Study* (LIS), basis data Distribusi Pendapatan Dunia dari Branko Milanovic, Basis Data Sosioekonomi untuk Amerika Latin dan Karibia, serta survei pendapatan dan pengeluaran rumah tangga yang dihimpun oleh *International Labour Organization* (ILO).

SWIID menyediakan dua versi Koefisien Gini berdasarkan konsep pendapatan yang berbeda: Gross Gini, yang mencerminkan kesenjangan berdasarkan pendapatan pasar, yakni pendapatan yang dihitung sebelum pajak dan transfer pemerintah (seperti pensiun atau bantuan tunai); dan Net Gini, yang dihitung menggunakan pendapatan siap belanjakan (*disposable income*), yakni pendapatan setelah dikurangi pajak dan ditambah transfer.

Variabel independen utama studi ini adalah efektivitas kebijakan Anti-Pencucian Uang (*Anti-Money Laundering*/AML). Untuk mengukurnya, analisis ini memanfaatkan Indeks Basel AML yang dirilis secara tahunan oleh *Basel Institute on Governance*. Alih-alih mengukur kinerja penegakan AML secara langsung, indeks ini menunjukkan sejauh mana tingkat risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme (*Money Laundering/Terrorist Financing*, atau

[20] Solt, "Measuring Income Inequality," 1184.

ML/TF) yang dihadapi oleh suatu negara, berkaitan erat dengan ketahanan institusi nasional dalam mengelola risiko tersebut. Indeks ini disusun dari lima komponen: kerangka kerja regulasi AML/CFT (65%), transparansi keuangan dan kepatuhan terhadap standar internasional (15%), tingkat penyuapan dan korupsi (10%), pertimbangan risiko hukum dan politik (5%), serta akuntabilitas dan transparansi publik (5%).

Indeks Basel AML pada bentuk aslinya berkisar antara 0 (risiko terendah) hingga 10 (risiko tertinggi). Hal ini berarti nilai mentah yang lebih tinggi mengindikasikan kapasitas institusional yang lebih lemah dalam menanggulangi kejahatan keuangan. Mengikuti pendekatan Agoba et al. [21], indeks ini ditransformasikan menggunakan formula:

$$\text{AML_Effective} = -1 \times (\text{AMLR} - 10)$$

Melalui transformasi ini, nilai yang lebih tinggi pada variabel operasional mencerminkan efektivitas kebijakan AML yang lebih kuat.

Untuk menghindari estimasi yang bias dan mengisolasi hubungan antara efektivitas AML dan kesenjangan pendapatan, sejumlah variabel kontrol dimasukkan ke dalam model analisis. Variabel-variabel ini dipilih berdasarkan kerangka teoretis dan empiris yang dilaporkan dari studi mengenai kesenjangan pendapatan lintas negara. Variabel kontrol mencakup populasi perkotaan (*urban population*), penyerapan tenaga kerja sektor industri (*industry sector employment*), dan kredit domestik (*domestic credit*) sebagai representasi pembangunan ekonomi.

Mengacu pada literatur transformasi struktural, seperti kurva Kuznets dan model Lewis,[22] variabel-variabel tersebut berfungsi sebagai kontrol atas faktor-faktor pendorong pembangunan yang turut menentukan distribusi pendapatan. Selain itu, kondisi makroekonomi, variabel kebijakan fiskal dan moneter, serta penerimaan dari sumber daya alam (*natural resource rents*) juga dimasukkan. Untuk uji ketahanan (*robustness check*), PDB per kapita dan indikator kebijakan fiskal/moneter tambahan disertakan untuk menguji sensitivitas hubungan antara AML dan ketimpangan.

Penelitian ini mengaplikasikan model efek tetap (*fixed effects*, atau FE) dengan menyertakan efek tetap waktu (*time-fixed effects*). Menurut Gösser dan Moshgbar [23], penyertaan spesifikasi waktu merupakan standar dalam estimasi data panel, karena mampu mengontrol peristiwa global yang memengaruhi seluruh negara secara simultan. Dalam periode pengamatan penelitian ini, kejutan global utama terjadi pada tahun 2016 ketika dokumen Panama Papers bocor dari firma hukum asal Panama, Mossack Fonseca. Peristiwa ini mendorong perubahan signifikan dalam transparansi pajak dan regulasi AML di berbagai yurisdiksi, pola yang kemudian diperkuat oleh kebocoran Pandora Papers pada 2021, sehingga penerapan efek tetap waktu menjadi sangat krusial.

Guna menganalisis hubungan antara efektivitas kebijakan Anti-Pencucian Uang (*Anti-Money Laundering*/AML) dan kesenjangan pendapatan, studi ini mengadaptasi kerangka pemodelan empiris dari Furceri dan Ostry[24], Saha et al.[25], dan Ofoeda et al.[26]. Model ini mengintegrasikan variabel independen utama, variabel kontrol, serta efek tetap negara dan

[21] Anthony M. Agoba et al., "Central Bank Independence, Political Instability and the Incidence of Currency Crises," *International Journal of Emerging Markets* 14, no. 5 (2019): 809–830, https://doi.org/10.1108/IJOEM-08-2018-0423.

[22] Simon Kuznets, "Economic Growth and Income Inequality," *American Economic Review* 45, no. 1 (1955).

[23] Niklas Gösser and Nima Moshgbar, "Smoothing Time Fixed Effects," *CESifo Working Paper* (2020), https://hdl.handle.net/10419/222263.

[24] Davide Furceri and Jonathan D. Ostry, "Robust Determinants of Income Inequality," *Oxford Review of Economic Policy* 35, no. 3 (2019): 460–517, https://doi.org/10.1093/oxrep/grz014.

[25] Saha et al., "Corruption Control," 100774.

[26] Isaac Ofoeda, Ebo Kweku Agbloyor, and Joshua Yindenaba Abor, "How Do Anti-Money Laundering Regulations Affect Bank Risk-Taking?" *Cogent Economics & Finance* 10, no. 1 (2022): 2058735, https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2058735.

waktu (*country and time fixed effects*). Adapun spesifikasi model empiris yang digunakan dalam estimasi ini adalah sebagai berikut:

$$\boldsymbol{Inq_{it} = \beta_0 + \beta_1 AMLR_{it} + \beta_2 Urpop_{it} + \beta_3 EmployInd_{it} + \beta_4 Domcred_{it} + \beta_j X_{it} + \varepsilon_{it}}$$

$$\boldsymbol{Inq(Brt)_{it} = \beta_0 + \beta_1 AMLR_{it} + \beta_2 Urpop_{it} + \beta_3 EmployInd_{it} + \beta_4 Domcred_{it} + \varepsilon_{it}} \quad \text{.....(1)}$$

$$\boldsymbol{Inq(Brt)_{it} = \beta_0 + \beta_1 AMLR_{it} + \beta_2 Urpop_{it} + \beta_3 EmployInd_{it} + \beta_4 Domcred_{it} + \beta_j X_{it} + \varepsilon_{it}} \quad \text{.....(2)}$$

$$\boldsymbol{Inq(Net)_{it} = \beta_0 + \beta_1 AMLR_{it} + \beta_2 Urpop_{it} + \beta_3 EmployInd_{it} + \beta_4 Domcred_{it} + \varepsilon_{it}} \quad \text{.....(3)}$$

$$\boldsymbol{Inq(Net)_{it} = \beta_0 + \beta_1 AMLR_{it} + \beta_2 Urpop_{it} + \beta_3 EmployInd_{it} + \beta_4 Domcred_{it} + \beta_j X_{it} + \varepsilon_{it}} \quad \text{.....(4)}$$

$$\boldsymbol{Inq(Brt)_{it} = \beta_0 + \beta_1 AMLR_{it} + \beta_2 Urpop_{it} + \beta_3 EmployInd_{it} + \beta_4 Domcred_{it} + \beta_j X_{it} + GDPcap + \varepsilon_{it}} \quad (5)$$

$$\boldsymbol{Inq(Net)_{it} = \beta_0 + \beta_1 AMLR_{it} + \beta_2 Urpop_{it} + \beta_3 EmployInd_{it} + \beta_4 Domcred_{it} + \beta_j X_{it} + Govex + \varepsilon_{it}} \quad ..(6)$$

Variabel Inq_{it} merepresentasikan kesenjangan pendapatan di negara i pada waktu t. Variabel ini diukur melalui dua jenis koefisien Gini, yaitu *Gross Gini* ($InqBrt_{it}$) dan *Net Gini* ($InqNet_{it}$).

$AMLR_{it}$ adalah regulasi anti-pencucian uang (*anti-money laundering*/AML). Nilai dari variabel ini didapat melalui Indeks AML dari *Basel Institute on Governance*.

$Urpop_{it}$ merepresentasikan populasi perkotaan, yang dihitung sebagai persentase dari total populasi.

$EmployIn_{it}$ merepresentasikan jumlah tenaga kerja di sektor industri sebagai persentase dari total kesempatan kerja.

$Domcredit_{it}$ merepresentasikan persentase kredit domestik untuk sektor swasta sebagai proporsi terhadap total PDB.

X_{it} merepresentasikan variabel-variabel kontrol tambahan, yang meliputi: (1) kondisi makroekonomi (tingkat pertumbuhan PDB dan tingkat pengangguran); (2) kebijakan fiskal (pengeluaran konsumsi pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB); (3) kondisi moneter (tingkat inflasi); (4) penerimaan dari sumber daya alam (*natural resource rents*) sebagai persentase dari PDB; serta (5) khusus untuk model uji ketahanan (*robustness models*, yaitu Model 5–6), PDB per kapita. ε_{it} merupakan galat acak (*error term*).

Hasil dan Pembahasan

Untuk menghindari potensi endogenitas dalam analisis data panel, kami melakukan uji diagnostik dua tahap pada variabel utama, yaitu indeks kebijakan AML. Pertama, pengujian korelasi antara variabel independen utama (indeks kebijakan AML) dan residual yang diperoleh dari regresi efek tetap (*baseline fixed-effects regression*). Nilai koefisien korelasi Pearson menunjukkan tidak adanya korelasi yang signifikan secara statistik antara variabel kebijakan AML dan residual. Kedua, regresi pembantu (*auxiliary regression*) dijalankan dengan meregresikan variabel kebijakan AML terhadap residual. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel kebijakan AML tidak memprediksi residual secara signifikan, yang mengonfirmasi ketiadaan korelasi sistematis antara variabel penjelas dan suku galat (*error term*).

Prosedur dua tahap ini secara langsung menguji kondisi inti endogenitas, yakni korelasi antara variabel independen dan suku galat (error term). Metode ini sejalan dengan pendekatan diagnostik dalam studi data panel lintas negara sejenis yang memanfaatkan indeks komposit institusional.[27] Pengujian endogenitas berbasis variabel instrumen (*IV*) meningkatkan tingkat ketahanan (*robustness*) tambahan. Namun, identifikasi instrumen eksternal yang valid untuk Indeks Komposit Basel AML belum memungkinkan untuk dilakukan dalam kerangka data saat ini.

[27] Lihat, misalnya, Saha et al., "Corruption Control," 100774; Ofoeda et al., "How Do Anti-Money Laundering Systems," 2058735.

Meski demikian, terlepas dari pengujian tersebut, potensi endogenitas yang memengaruhi hasil estimasi masih tetap ada karena keterbatasan tertentu dalam studi ini, yang mencakup:

Data mengenai kebijakan AML diperoleh dari Indeks AML *Basel Institute*, yang menggabungkan lima komponen indeks komposit. Komponen terbesar di dalam Indeks AML adalah kerangka kerja AML, yang mengintegrasikan penilaian terhadap implementasi dan efektivitas kebijakan AML, serta penanggulangan pendanaan terorisme. Meskipun komponen penanggulangan pendanaan terorisme memiliki proporsi yang relatif kecil, terdapat beberapa penilaian kebijakan yang saling terkait antara AML dan penanggulangan pendanaan terorisme. Selain itu, studi ini belum memperhitungkan karakteristik spesifik dari masing-masing negara. Dalam penerapan kebijakan AML, setiap negara mengimplementasikan kebijakan yang diselaraskan dengan rekomendasi FATF (*Financial Action Task Force*) 40+2, dengan menyesuaikannya terhadap konteks dan karakteristik spesifik masing-masing.

Studi ini diawali dengan analisis deskriptif yang komprehensif dilakukan untuk setiap variabel yang digunakan. Hasil analisis deskriptif terkait variabel-variabel dalam model analitis disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Analisis Deskriptif Variabel

VARIABLES	OBS	MEAN	STDDEV	MIN	MAX
INQ (GROSS GINI)	640	46,28	5,96	31,8	71,8
INQ (NET GINI)	640	35,50	7,32	22,6	63
AMLR	640	4,79	1,09	1,91	8,22
GDPCAP	640	22.788,27	23.331,9	484,44	12.3678,7
DOMCRED	640	75,14	46,55	4,77e-06	254,66
UNEMPLOY	640	7,28	4,87	0,25	27,47
EMPLOYIND	640	22,05	5,46	5,48	38,12
INFL	640	3,47	4,74	0,0083	53,55
URPOP	640	69,46	16,85	29,26	100
GOVEX	640	16,51	4,46	4,40	30,003
NATRES	640	3,12	5,44	0	48,50

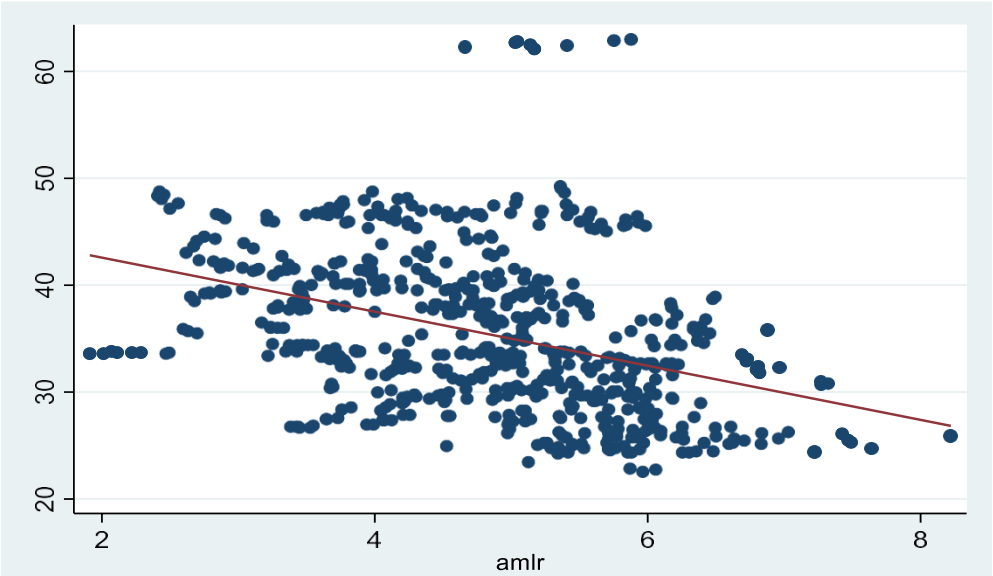
Sumber: Perhitungan penulis, menggunakan data estimasi

Dari 640 observasi, koefisien *Gross Gini* memiliki nilai minimum sebesar 31,8 dan nilai maksimum sebesar 71,8, dengan nilai rata-rata (*mean*) 46,28 serta deviasi standar 5,96. Di sisi lain, koefisien *Net Gini* berkisar antara 22,60 hingga 63,00, dengan nilai rata-rata 35,50 serta deviasi standar 7,32.

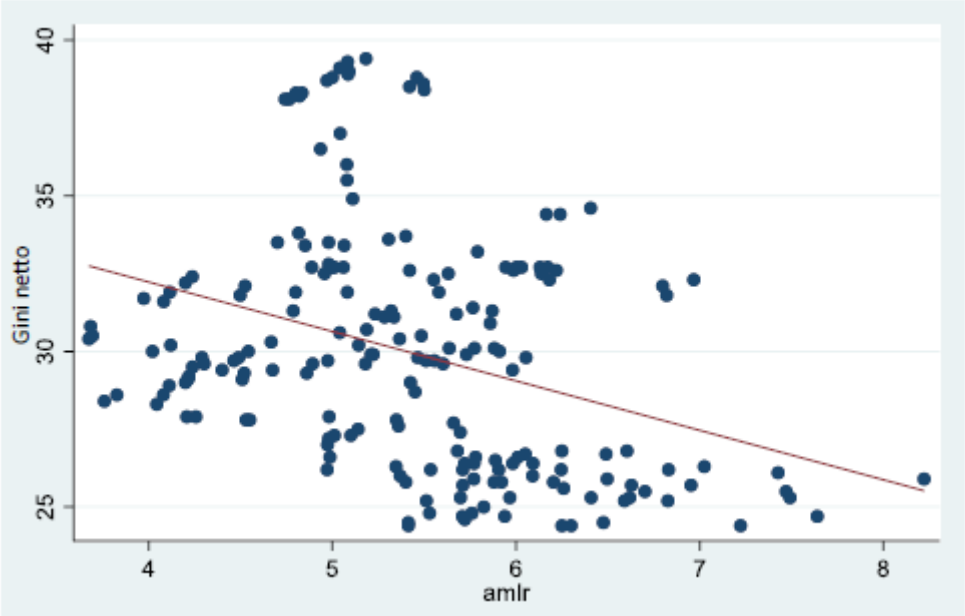
Tabel 2 menyajikan nilai *Gross Gini* (46,28) secara konsisten lebih tinggi dibandingkan nilai *Net Gini* (35,50). Hal ini mengindikasikan kondisi ketimpangan pendapatan yang lebih buruk daripada pengukuran menggunakan *Net Gini*. Disparitas ini terjadi karena perhitungan *Gross Gini* menggunakan komponen pendapatan sebelum adanya redistribusi pendapatan, seperti pemotongan pajak dan transfer kesejahteraan sosial.

Variabel bebas yang berupa indeks kebijakan anti-pencucian uang ($Amlr$) memiliki rentang nilai observasi dari 1,91 pada batas bawah hingga 8,22 pada batas atas. Nilai rata-rata variabel $Amlr$ adalah sebesar 4,79 dengan deviasi standar 1,09. Mirip dengan variabel Inq, variabel $Amlr$ menunjukkan karakteristik di mana deviasi standar lebih kecil daripada nilai rata-rata. Hal ini mengindikasikan bahwa variasi data $Amlr$ relatif homogen. Untuk melihat

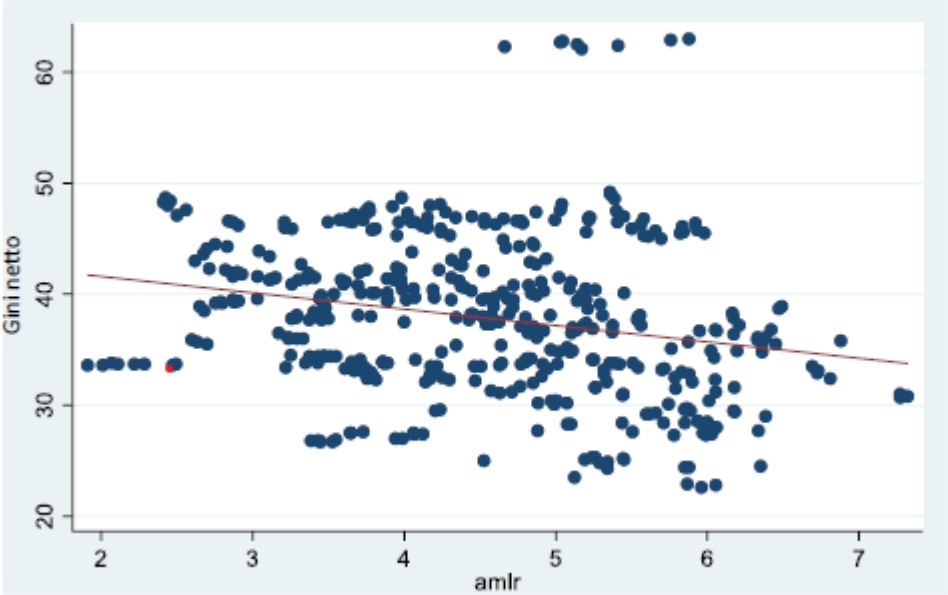
estimasi awal hubungan antara kedua variabel utama tersebut, Gambar 1 menampilkan grafik alur korelasi keduanya.



Gambar 1. Prediksi korelasi antara kebijakan anti-pencucian uang (AML) dan ketimpangan pendapatan



Gambar 1a. Prediksi korelasi antara kebijakan anti-pencucian uang (AML) dan ketimpangan pendapatan (negara maju)



Gambar 1b. Prediksi korelasi antara kebijakan anti-pencucian uang (AML) dan ketimpangan pendapatan (negara berkembang)
Sumber: Perhitungan penulis, menggunakan data estimasi

Gambar 1 menyajikan diagram tebar (*scatter plot*) yang menunjukkan hubungan bivariat antara indeks efektivitas AML dan kesenjangan pendapatan. Garis regresi (*fitted regression line*) menunjukkan kemiringan (*slope*) negatif yang jelas, mengindikasikan bahwa negara-negara dengan efektivitas AML yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kesenjangan pendapatan yang lebih rendah. Titik-titik data dibedakan berdasarkan kelompok negara, yakni negara maju ditunjukkan dengan penanda pejal (*solid markers*), sedangkan negara berkembang dengan penanda berongga (*open markers*).

Korelasi negatif terlihat lebih kuat pada kelompok negara berkembang dibandingkan dengan negara maju. Hal ini mencerminkan tingginya paparan terhadap risiko pencucian uang dan aliran keuangan ilegal di negara-negara berkembang. Temuan ini sejalan dengan temuan Huang dan Ho,[28] yang melaporkan bahwa kualitas tata kelola dapat mengurangi kesenjangan dengan lebih baik di negara berkembang daripada di negara maju. Korelasi negatif ini berlaku secara universal, baik pada keseluruhan himpunan data maupun pada subkelompok negara maju dan berkembang.

Terkait hubungan antara kesenjangan pendapatan dan kebijakan AML, tidak ada perbedaan arah korelasi di seluruh kelompok negara. Temuan ini menegaskan bahwa tingginya indeks kebijakan AML berkorelasi dengan rendahnya tingkat kesenjangan pendapatan, dan berlaku sebaliknya.

Studi ini mengestimasi model parsial dan model penuh (*complete model*). Koefisien *Gross Gini* diterapkan pada Model 1 dan Model 2, sedangkan koefisien *Net Gini* diterapkan pada Model 3 dan Model 4 (lihat Tabel 3). Model parsial mencakup Model 1 dan Model 3, sedangkan model penuh mencakup Model 2 dan Model 4 (lihat Tabel 3). Berikut adalah hasil estimasi regresi menggunakan metode efek tetap (*fixed effects*) dengan penambahan efek tetap waktu (*time fixed effects*) untuk mengetahui hubungan antara kesenjangan pendapatan dan kebijakan anti-pencucian uang, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

[28] Huang and Ho, "Impact of Governance."

Tabel 3. Hasil Estimasi

VARIABLES	MODEL 1 INQ (GROSS)	MODEL 2 INQ (GROSS)	MODEL 3 INQ (NET)	MODEL 4 INQ (NET)
AMLR	-0,239*** (0,070)	-0,230*** (0,069)	-0,174** (0,069)	-0,166 ** (0,069)
URPOP	-0,072* (0,0408)	-0,095** (0,040)	-0,127*** (0,040)	-0,141 *** (0,040)
EMPLOYIND	-0,119*** (0,026)	-0,085*** (0, 0277)	-0,127*** (0,026)	-0,104 *** (0,027)
DOMCRED	0,004* (0,0025)	-0,0007 (0,0028)	-0,0007 (0,0025)	-0,003 (0,002)
UNEMPLOY		0,069*** (0,019)		0,045 *** (0,019)
INFL		-0,003 (0,008)		0,003 (0,008)
NATRES		0,027* (0,0147)		0,018 (0,014)
CONSTANT	54,98 (2,775)	55,367 (2,758)	48,355 (2,751)	48,491 (2,755)
OBSERVASI	640	640	640	640
R-SQUARED (WITHIN)	0,191	0,2138	0,2206	0,2305
NUMBER OF ID	80	80	80	80

Galat baku robust disajikan dalam tanda kurung. ***p<0,01, **p<0,05, *p<0,1
Sumber: Perhitungan penulis, menggunakan data estimasi

Hasil estimasi pada Model (1) menunjukkan bahwa indikator anti-pencucian uang ($Amlr$) berhubungan secara negatif dan signifikan dengan kesenjangan pendapatan (Inq). Koefisien sebesar -0,239 mengindikasikan bahwa peningkatan satu poin pada indeks AML sepadan dengan penurunan sebesar 0,239 poin pada ukuran *Gross Gini*. Dua variabel tambahan, yaitu proporsi populasi perkotaan ($urpop$) dan penyerapan tenaga kerja di sektor industri ($EmployInd$), juga menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan, masing-masing dengan koefisien sebesar -0,072 dan -0,119. Sebaliknya, kredit domestik ($Domcred$) menghasilkan pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap kesenjangan.

Model (2), yang memasukkan seluruh variabel kontrol, menghasilkan pola yang konsisten. Indeks AML tetap berhubungan negatif dengan ketimpangan, dengan koefisien sebesar -0,230, yang mengindikasikan bahwa peningkatan efektivitas AML secara konsisten berbanding lurus dengan penurunan nilai Gini. Sama seperti model pertama, $urpop$ (-0,095) dan $EmployInd$ (-0,085) masih tetap memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Sebaliknya, tingkat pengangguran ($Unemploy$) dan penerimaan dari sumber daya alam ($NatRes$) muncul sebagai determinan positif yang signifikan, masing-masing dengan koefisien sebesar 0,069 dan 0,027.

Pada Model (3), hubungan negatif antara kekuatan kebijakan AML dan ketimpangan pendapatan tetap bertahan. Koefisien sebesar -0,174 mengimplikasikan bahwa peningkatan satu unit pada indeks AML berhubungan dengan penurunan sebesar 0,174 poin pada koefisien *Net Gini*. Proporsi populasi perkotaan (-0,141) dan penyerapan tenaga kerja industri (-0,127)

terus menunjukkan efek negatif yang signifikan, sementara tingkat pengangguran kembali menunjukkan hubungan positif dan signifikan secara statistik terhadap kesenjangan, ditunjukkan oleh nilai koefisiennya sebesar 0,104.

Hasil estimasi dari Model (4), yang mencakup seluruh variabel kontrol, mengindikasikan hubungan negatif dan signifikan antara kebijakan anti-pencucian uang ($Amlr$) dan ketimpangan pendapatan (Inq), dengan nilai koefisien sebesar -0,166. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk setiap kenaikan satu poin pada indeks AML, koefisien *Net Gini* mengalami penurunan sebesar 0,166 poin. Variabel lain dalam model ini yang memiliki dampak negatif dan signifikan adalah $urpop$ (-0,095) dan $EmployInd$ (-0,085).

Secara keseluruhan, Model 1 hingga Model 4 menunjukkan adanya korelasi negatif yang signifikan antara regulasi anti-pencucian uang ($Amlr$) dan kesenjangan pendapatan (Inq). Pengamatan terhadap koefisien $Amlr$ menunjukkan bahwa pengaruh $Amlr$ secara dominan terdapat pada indeks *Gross Gini* dibandingkan *Net Gini*. Meskipun hubungan tersebut signifikan secara statistik, besaran dampaknya tergolong moderat dalam konteks ekonomi. Secara spesifik, kenaikan satu unit pada indeks $Amlr$ berhubungan dengan penurunan Inq sebesar 0,166 poin pada Model 4. Mengingat bahwa perbedaan antara ukuran *Gross Gini* dan *Net Gini* mencerminkan peran mekanisme redistribusi dan transfer fiskal, hasil ini mengimplikasikan bahwa $Amlr$ dapat memengaruhi kesenjangan sebagian melalui hal yang berkaitan dengan perpajakan atau redistribusi pendapatan. Temuan ini sesuai dengan ekspektasi teoretis yang mengindikasikan bahwa keterkaitan antara $Amlr$ dan kesenjangan bekerja, antara lain, melalui penekanan angka pengelakan pajak.

Hubungan negatif antara AML dan kesenjangan dapat dipahami melalui beberapa saluran transmisi (*transmission channels*). Pertama, penegakan AML akan merusak skema pengelakan pajak, khususnya penyembunyian kekayaan di luar negeri (*offshore*), sehingga menjaga penerimaan pajak pemerintah untuk program-program redistributif. Kedua, dengan menekan aliran keuangan ilegal yang secara tidak proporsional menguntungkan elite ekonomi, kebijakan AML membatasi penumpukan kekayaan pada kelompok pendapatan di kalangan atas. Ketiga, peningkatan kepatuhan AML memperkuat transparansi keuangan, yang pada gilirannya mengurangi perilaku berburu sewa (*rent-seeking behavior*) yang memusatkan sumber daya pada kelompok yang memiliki koneksi politik. Secara bersama-sama, saluran-saluran transmisi ini mendukung distribusi pendapatan yang lebih adil di berbagai negara.

Indikator perkembangan ekonomi $urpop$ dan $EmployInd$ menunjukkan korelasi negatif yang kuat terhadap ketimpangan pendapatan (Inq). Proporsi populasi yang tinggal di kawasan perkotaan ($urpop$) berhubungan secara negatif dan signifikan dengan kesenjangan pendapatan. Sebagaimana dilaporkan oleh Wan et al. [29], urbanisasi membantu mengecilkan disparitas antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Pusat-pusat perkotaan umumnya menawarkan rata-rata upah yang lebih tinggi serta peluang kerja yang lebih beragam dibandingkan wilayah pedesaan. Konsekuensinya, perpindahan penduduk dari komunitas pedesaan ke kota-kota cenderung meningkatkan tingkat pendapatan mereka. Pada saat yang sama, migrasi keluar dari wilayah pedesaan dapat memberi akses yang lebih besar terhadap sumber daya lokal bagi masyarakat yang bertahan. Secara akumulatif, dinamika ini mengindikasikan bahwa urbanisasi mampu berperan dalam mengikis jurang pemisah desa-kota sekaligus menurunkan kesenjangan pendapatan secara keseluruhan.

Sementara itu, proporsi penyerapan tenaga kerja ($EmployInd$) juga menunjukkan hubungan negatif terhadap kesenjangan pendapatan. Saha et al. [30] melaporkan indikator ini untuk mengevaluasi kemampuan penyerapan tenaga kerja dalam memitigasi disparitas, dengan mencatat bahwa peningkatan penyerapan tenaga kerja industri kerap mencerminkan pergeseran

[29] Guanghua Wan, Xi Zhang, and Mengdong Zhao, "Urbanization Can Help Reduce Income Inequality," *NPJ Urban Sustainability* 2, no. 1 (2022), https://doi.org/10.1038/s42949-021-00040-y.
[30] Saha et al., "Corruption Control," 100774.

struktural dari sektor pertanian menuju sektor industri, yang berjalan seiring dengan perbaikan tingkat pendidikan menengah. Perkembangan ini secara umum berbanding lurus dengan peningkatan level pendapatan secara keseluruhan. Temuan Mehic[31] juga mengonfirmasi bahwa pada negara-negara maju, penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi di sektor industri berhubungan secara signifikan dengan tingkat kesenjangan pendapatan yang lebih rendah.

Di sisi lain, variabel yang merepresentasikan penerimaan sumber daya alam memiliki korelasi positif terhadap ketimpangan pendapatan. Temuan ini mengimplikasikan bahwa penerimaan yang lebih tinggi dari sumber daya alam berpadanan dengan peningkatan tingkat ketimpangan pendapatan. Menuet [32] dan Ogwang et al.[33] mengemukakan bahwa sumber daya alam dapat menjadi kutukan (*curse*) bagi masyarakat karena memperkuat kompetisi berburu sewa (*rent-seeking*) dan konflik sosial. Akibatnya, akumulasi pendapatan dari sumber daya alam cenderung terkonsentrasi pada kelompok-kelompok tertentu, yang pada gilirannya memperlebar disparitas pendapatan antarlapisan masyarakat.

Variabel perkembangan sektor keuangan, yang diwakili oleh kredit domestik untuk sektor swasta ($Domcred$), menunjukkan korelasi positif dan signifikan pada Model (1). Penjelasan yang rasional atas temuan ini adalah bahwa pertumbuhan sektor keuangan cenderung dimanfaatkan secara optimal oleh kelompok berpendapatan tinggi, sementara kelompok berpendapatan rendah menghadapi hambatan aksesibilitas untuk memanfaatkan sektor tersebut dalam meningkatkan pendapatan mereka. Konsekuensinya, ketimpangan pendapatan berpotensi mengalami peningkatan.

Hasil yang dipaparkan dalam studi ini sejalan dengan hipotesis penelitian bahwa implementasi kebijakan anti-pencucian uang yang lebih efektif akan mendorong penurunan kesenjangan pendapatan. Berbeda dari Shafique dan Haq[34] dan Sittha,[35] yang menggunakan indeks tata kelola komposit sebagai proksi, penelitian ini mengaplikasikan Indeks Basel AML untuk menguji hubungan AML dan kesenjangan secara langsung. Spesifisitas ini merupakan keunggulan metodologis yang memungkinkan perumusan kebijakan lebih terarah dalam menempatkan kerangka kerja anti-pencucian uang. Hasil regresi ini sekaligus memperkuat studi sebelumnya oleh Shafique dan Haq [36] dan Sittha,[37] yang melaporkan korelasi negatif antara tata kelola yang baik (yang digunakan sebagai prediktor variabel $Amlr$) dan kesenjangan pendapatan.

Uji ketahanan (*robustness check*) didapat dari evaluasi terhadap kestabilan koefisien regresi utama ketika spesifikasi model diubah, yang umumnya dilakukan melalui penambahan atau pengeluaran variabel penjelas tertentu.[38] Dalam penelitian ini, uji ketahanan dilakukan dengan memperluas spesifikasi Model (2) dan Model (4). Dua variabel tambahan dimasukkan ke dalam model: PDB per kapita ($Gdpcap$), yang digunakan sebagai indikator tingkat pembangunan ekonomi suatu negara,[39] serta pengeluaran konsumsi pemerintah ($govex$), yang berfungsi sebagai proksi kebijakan fiskal. Pelibatan $govex$ didasari oleh studi terdahulu yang

[31] Adrian Mehic, "Industrial Employment and Income Inequality: Evidence from Panel Data," *Structural Change and Economic Dynamics* 45 (2018): 84–93, https://doi.org/10.1016/j.strueco.2018.02.002.

[32] Maxime Menuet, "Natural Resources, Civil Conflicts, and Economic Development," *GREDEG Working Paper* (2024), https://ideas.repec.org/s/gre/wpaper.html.

[33] Tom Ogwang, Frank Vanclay, and Albert Van Den Assem, "Rent-Seeking Practices, Local Resource Curse, and Social Conflict in Uganda's Emerging Oil Economy," *Land* 8, no. 4 (2019): 53.

[34] Shafique and Haq, "Governance and Income Inequality."

[35] Sittha, "Governance and Poverty Reduction."

[36] Shafique and Haq, "Governance and Income Inequality," 752.

[37] Sittha, "Governance and Poverty Reduction," 488.

[38] Xun Lu and Halbert White, "Robustness Checks and Robustness Tests in Applied Economics," *Journal of Econometrics* 178, no. 1 (2014): 194–206, https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2013.08.016.

[39] Furceri and Ostry, "Robust Determinants," 462.

menunjukkan bahwa pola pengeluaran publik dapat memengaruhi disparitas pendapatan, sebagaimana terbukti pada negara-negara di kawasan Afrika.[40]

Setelah memasukkan variabel $Gdpcap$ dan $govex$ ke dalam Model (5) dan Model (6) (lihat Tabel 4), didapat hasil yang menunjukkan bahwa hubungan antara variabel $Amlr$ dan Inq tetap bernilai negatif dan signifikan. Hasil ini konsisten dengan estimasi dari Model (2) dan Model (4). Penambahan variabel-variabel kontrol tersebut tidak mengubah arah korelasi maupun tingkat signifikansi dari variabel-variabel inti. Hasil ini membuktikan bahwa model regresi untuk variabel utama memiliki tingkat ketahanan (*robust*) yang tinggi.

Tabel 4. Hasil Uji Ketahanan

VARIABLES	5 (BRUTO)	6 (NET)
AMLR	-0,204*** (0,068)	-0,151** (0,069)
URPOP	-0,101** (0,040)	-0,145*** (0,040)
EMPLOYIND	-0,080*** (0,027)	-0,102*** (0,027)
DOMCRED	-0,001 (0,002)	-0,004 (0,002)
UNEMPLOY	0,0594*** (0,018)	0,040** (0,019)
INFL	0,006 (0,008)	0,001 (0,008)
SDA	0,027* (0,014)	0,017 (0,015)
GDPCAP	-0,00004*** (9,08e-06)	-0,00002*** (9,21e-06)
GOVEX	0,013 (0,031)	0,014 (0,032)
CONSTANT	57,100 (2,823)	49,631 (2,866)
OBSERVASI	640	640
R-SQUARED (WITHIN)	0,2491	0,2413
NUMBER OF ID	80	80

Galat baku robust dalam tanda kurung ***p<0,01, **p<0,05, *p<0,1
Sumber: Perhitungan penulis, menggunakan data estimasi

Kesimpulan

Studi ini membuktikan bahwa efektivitas kebijakan anti-pencucian uang (*Anti-Money Laundering*/AML) berhubungan secara negatif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan, baik pada indeks *Gross Gini* maupun *Net Gini*. Pengaruh yang lebih kuat pada *Gross Gini* mengindikasikan bahwa regulasi AML tidak hanya menekan akumulasi kekayaan ilegal, tetapi juga memperkuat mekanisme redistribusi pendapatan negara. Secara spesifik, penegakan AML yang efektif berfungsi menutup skema pengelakan pajak (*tax evasion*),

[40] Mark Edem Kunawotor, Godfred Alufar Bokpin, and Charles Barnor, "Drivers of Income Inequality in Africa: The Role of Institutions," *African Development Review* 32, no. 4 (2020): 718–729, https://doi.org/10.1111/1467-8268.12473.

pelarian modal (*capital flight*), dan korupsi, sehingga menjaga basis penerimaan pajak domestik untuk dialokasikan kembali pada program kesejahteraan sosial dan sektor publik.

Temuan ini memberikan kontribusi empiris penting bahwa kebijakan AML tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen stabilitas sektor keuangan, melainkan juga sebagai instrumen makroekonomi dalam menekan kesenjangan pendapatan secara efektif.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan temuan ini, muncul sejumlah rekomendasi kebijakan. Pertama, setiap negara perlu memperkuat komponen inti Indeks AML, khususnya kerangka hukum dan kelembagaan AML, dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta menekan risiko hukum dan politik.

Kedua, standar transparansi keuangan dan kepatuhan, yang merupakan komponen terbesar kedua dalam Indeks AML, perlu diperkuat melalui kolaborasi erat dengan sektor keuangan. Langkah ini membantu menekan pengelakan pajak (tax evasion) dan korupsi yang memanfaatkan sistem keuangan untuk pencucian uang.

Ketiga, pembuat kebijakan sebaiknya memberi perhatian khusus pada langkah AML yang menyasar pengelakan pajak dan korupsi, karena kedua kejahatan ini berdampak langsung pada kesenjangan melalui pengaruhnya terhadap penerimaan negara dan redistribusi pendapatan.

Keempat, mengingat sifat pencucian uang dan aliran dana ilegal yang lintas negara, pembuat kebijakan perlu memprioritaskan penguatan kerangka kerja sama internasional, seperti Pertukaran Informasi Rekening Keuangan secara Otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information/AEOI), Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance Treaties/MLATs), dan keterlibatan aktif dalam jaringan global Financial Action Task Force (FATF). Kerja sama ini penting untuk menutup celah yang memungkinkan kekayaan ilegal disembunyikan lintas batas, sekaligus memperkuat upaya AML domestik beserta dampak lanjutannya pada kesenjangan pendapatan.

Namun, efektivitas kebijakan AML dalam menekan kesenjangan pendapatan tidak seragam antarnegara. Besar kecilnya hubungan ini kemungkinan dipengaruhi oleh kualitas kerangka kelembagaan yang lebih luas, termasuk independensi peradilan, supremasi hukum, dan kapasitas administratif. Negara dengan lingkungan kelembagaan yang lebih kuat berpeluang memperoleh manfaat penurunan kesenjangan yang lebih besar dari penerapan AML, sedangkan negara dengan kelembagaan yang lebih lemah menghadapi tantangan lebih berat dalam menerjemahkan kepatuhan AML menjadi hasil distribusi yang nyata. Memperkuat komponen kerangka AML ini akan mempersulit pelaku menyembunyikan atau menikmati hasil kejahatan. Seiring menyempitnya peluang pengelakan pajak dan korupsi serta dipulihkan dan dialihkannya hasil kejahatan ke kegiatan produktif, kesenjangan pendapatan dapat menurun secara berarti.

Keterbatasan dan Penelitian Selanjutnya

Studi ini memiliki sejumlah keterbatasan. Analisis bertumpu pada Indeks Basel AML yang bersifat komposit dan menggabungkan beberapa komponen ke dalam satu ukuran tunggal. Pemilihan periode penelitian 2012–2019 dibatasi oleh ketersediaan data SWIID sebagai sumber utama Koefisien Gini yang digunakan dalam studi ini; SWIID belum diperbarui untuk mencakup tahun 2020 dan seterusnya hingga April 2026, ketika tahap pengumpulan data penelitian ini sudah selesai, sehingga analisis belum dapat diperluas ke tahun-tahun terbaru, termasuk masa pandemi COVID-19 dan pascapandemi. Studi mendatang disarankan mengkaji ulang dinamika ini ketika data pembaruan SWIID telah tersedia, khususnya untuk menganalisis disrupsi era pandemi dan reformasi regulasi pascapandemi dalam hubungan antara penegakan hukum AML dan kesenjangan pendapatan.

Keterbatasan lain terletak pada spesifikasi model yang bersifat serentak, yaitu kebijakan AML dan kesenjangan pendapatan diukur pada tahun yang sama; penelitian selanjutnya

sebaiknya menguji penggunaan variabel AML berjeda (lagged, misalnya t-1 atau t-2) untuk menangkap hubungan dinamisnya secara lebih baik. Penelitian selanjutnya juga akan bermanfaat jika menelaah masing-masing komponen Indeks Basel AML guna memahami unsur mana yang paling kuat memengaruhi kesenjangan. Selain itu, penerapan kebijakan AML sangat beragam antarnegara, sehingga hubungan antara efektivitas AML dan kesenjangan dapat berbeda dari satu konteks ke konteks lain. Kajian lanjutan dapat menelusuri bagaimana setiap komponen Indeks AML memengaruhi kesenjangan dalam konteks nasional tertentu.

References

Agoba, A. M., J. Y. Abor, K. Osei, J. Sa-Aadu, B. Amoah, and G. C. O. Dzeha. 2019. "Central Bank Independence, Elections and Fiscal Policy in Africa." *International Journal of Emerging Markets* 14 (5): 809–830. https://doi.org/10.1108/IJOEM-08-2018-0423.

Argentiero, A., S. Casal, L. Mittone, and A. Morreale. 2021. "Tax Evasion and Inequality: Some Theoretical and Empirical Insights." *Economics of Governance* 22 (4): 309–320. https://doi.org/10.1007/s10101-021-00261-y.

Berdiev, A. N., and J. W. Saunoris. 2019. "On the Relationship between Income Inequality and the Shadow Economy." *Eastern Economic Journal* 45 (2): 224–249. https://doi.org/10.1057/s41302-018-0120-y.

Bezlov, Tihomir, and Philip Gounev. 2012. "Bulgaria: Corruption and organised crime in flux." In *Corruption and Organized Crime in Europe*, pp. 95-107. Routledge.

Demetriades, P. O., and R. Vassileva. 2020. "Money Laundering and Central Bank Governance in the European Union." *Journal of International Economic Law* 23 (2): 509–533. https://doi.org/10.1093/jiel/jgaa011.

Furceri, D., and J. D. Ostry. 2019. "Robust Determinants of Income Inequality." *Oxford Review of Economic Policy* 35 (3): 460–517. https://doi.org/10.1093/oxrep/grz014.

Gösser, N., and N. Moshgbar. 2020. "Smoothing Time Fixed Effects." DICE Discussion Paper No. 343. https://hdl.handle.net/10419/222263.

Goldbarsht, D., and L. de Koker, eds. 2024. *Financial Crime, Law and Governance: Navigating Challenges in Different Contexts.* Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice 116. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-59547-9.

Gründler, K., and N. Potrafke. 2019. "Corruption and Economic Growth: New Empirical Evidence." *European Journal of Political Economy* 60. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2019.08.001.

Huang, C.-J., and Y.-H. Ho. 2018. "The Impact of Governance on Income Inequality in Ten Asian Countries." *Journal of Reviews on Global Economics* 7.

Huang, B., and G. Wan. 2019. *Demystifying Rising Inequality in Asia.* Manila: Asian Development Bank.

International Monetary Fund. 2023. *2023 Review of the Fund's Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Strategy—Background Papers.* Policy Paper No. 2023/053. Washington, DC: International Monetary Fund.

Kunawotor, M. E., G. A. Bokpin, and C. Barnor. 2020. "Drivers of Income Inequality in Africa: Does Institutional Quality Matter?" *African Development Review* 32 (4): 718–729. https://doi.org/10.1111/1467-8268.12473.

Kuznets, S. 1955. "Economic Growth and Income Inequality." *American Economic Review* 45 (1).

Lu, X., and H. White. 2014. "Robustness Checks and Robustness Tests in Applied Economics." *Journal of Econometrics* 178 (1): 194–206. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2013.08.016.

Mehic, Adrian. 2018. "Industrial employment and income inequality: Evidence from panel data." *Structural Change and Economic Dynamics* 45 (2018): 84-93. https://doi.org/10.1016/j.strueco.2018.02.006

Menuet, M. 2024. "Natural Resources, Civil Conflicts, and Economic Growth." GREDEG Working Paper No. 2024-05. Université Côte d'Azur. https://ideas.repec.org/s/gre/wpaper.html.

Ofoeda, I., E. K. Agbloyor, and J. Y. Abor. 2022. "How Do Anti-Money Laundering Systems Affect FDI Flows across the Globe?" *Cogent Economics & Finance* 10 (1). https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2058735.

Ogwang, T., F. Vanclay, and A. Van Den Assem. 2019. "Rent-Seeking Practices, Local Resource Curse, and Social Conflict in Uganda's Emerging Oil Economy." *Land* 8 (4): 53.

Oueslati, A., and M. A. Labidi. 2015. "Growth, Inequality and Governance: A Case of MENA Countries." *SSRG International Journal of Economics and Management Studies* 2 (2): 28–34.

Paré, P.-P., and R. Felson. 2014. "Income Inequality, Poverty and Crime across Nations." *British Journal of Sociology* 65 (3): 434–458. https://doi.org/10.1111/1468-4446.12083.

Saha, S., H. Beladi, and S. Kar. 2021. "Corruption Control, Shadow Economy and Income Inequality: Evidence from Asia." *Economic Systems* 45 (2): 100774. https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2020.100774.

Schwuchow, S. C. 2023. "Organized Crime as a Link between Inequality and Corruption." *European Journal of Law and Economics.* https://doi.org/10.1007/s10657-023-09764-x.

Shafique, S., and R. Haq. 2006. "Governance and Income Inequality." *Pakistan Development Review* 45 (4). https://doi.org/10.30541/v45i4iipp.751-760.

Sittha, P. V. 2012. "Governance and Poverty Reduction in Thailand." *Modern Economy* 3 (5): 487–497. https://doi.org/10.4236/me.2012.35064.

Solt, F. 2020. "Measuring Income Inequality across Countries and over Time: The Standardized World Income Inequality Database." *Social Science Quarterly* 101 (3). https://doi.org/10.1111/ssqu.12795.

Todaro, M. P., and S. C. Smith. 2003. *Economic Development.* 11th ed. Boston: Addison-Wesley.

Wan, G., X. Zhang, and M. Zhao. 2022. "Urbanization Can Help Reduce Income Inequality." *NPJ Urban Sustainability* 2 (1). https://doi.org/10.1038/s42949-021-00040-y.

Wong, M. Y. 2017. "Public Spending, Corruption, and Income Inequality: A Comparative Analysis of Asia and Latin America." *International Political Science Review* 38 (3): 298–315. https://doi.org/10.1177/0192512116642617.

Zucman, G. 2013. "The Missing Wealth of Nations: Are Europe and the U.S. Net Debtors or Net Creditors?" *Quarterly Journal of Economics* 128 (3): 1321–1364. https://doi.org/10.1093/qje/qjt012.

Zucman, G. 2019. "Global Wealth Inequality." *Annual Review of Economics* 11 (1): 109–138. https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080218-025852